

PERKARA & ALASAN
PERJUANGAN ANGKATAN ACHEH - SUMATERA MERDEKA
Ceramah
Dimuka Scandinavian Association Of Southeast Asian Social Studies
Göteborg, Sweden, 23 Agustus, 1985
Oleh

DR, Tengku Hasan M. di Tiro
Ketua, Angkatan Aceh-Sumatera Merdeka
Terjemahan dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Melayu Aceh-Sumatera, bukan
"bahasa indonesia" Jawa

SEJARAH

Lama sekali sebelum kedatangan penjajahan-penjajahan Eropa Barat ke Dunia Melayu (Asia Tenggara), Aceh sudah menjadi satu negara merdeka yang berdaulat di Sumatera dan diakui dunia Internasional. Pada waktu itu, negara merdeka tersebut lebih terkenal dengan nama Kerajaan Aceh, tetapi kemudian menjadi lebih terkenal dengan nama sebuah pelabuhannya yang sering dikunjungi oleh kapal-kapal Eropa, yaitu pelabuhan 'Samudra' di Aceh bagian Utara, dari padanyalah berasal nama Sumatera. Buku **LAROUSE GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSELLE**, menggambarkan Kerajaan Aceh pada waktu itu sebagai "bangsa yang paling berkuasa di Dunia Melayu atau Hindia Timur, pada akhir abad ke-16 dan sampai pertengahan abad ke-17". (*"Vers la fin du XVIe siècle et jusqu' à la moitié du XVIIe, les Achins etaient la nation dominante de l'archipel Indien."*) Vol. I, p. 70, Paris, 1886. Sebuah sumber sejarah yang kuat lainnya, **LA GRAND ENCYCLOPEDIE**, menulis sebagai berikut: "Pada tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan kekuasaannya atas pulau-pulau Sunda (Sumatera, Jawa, Borneo, dan lain-lain), atas satu bagian dari semenanjung Tanah Melayu, dan mempunyai hubungan dengan segala bangsa yang melayari lautan Hindia, dari Jepang sampai ke Arab. Sejarah peperangan yang lama sekali dilancarkan oleh bangsa Aceh terhadap bangsa Portugis yang menduduki Malaka sejak permulaan abad ke-16, adalah halaman-halaman yang tidak kurang kemegahan dan kebesarannya dalam sejarah bangsa Aceh. Pada tahun 1586, seorang Sultan Aceh menyerang Portugis di Malaka dengan sebuah armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60,000 tentara laut." (*"En 1582, ils avaint étandu leur*

Malacca depuis le commentcement du XVIe siècle n'est pas une des pages les moins prépondérance sur les iles de la Sonde, sur une partie de la Presque 'île de Malacca, ils étaient en relation avec tous les pays que baigne l'océan Indien depuis le Japan jusqu' à glorieuse de l'histoire des Atchinois. En 1586, un de leur Sultans attaque les Portugais avec une flotte d' environ 500 voiles montée par 60,000 marins.") (Vol. IV, p. 402, Paris, 1874)

Tiga ratus tahun sesudah Belanda menduduki dan menjajah pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Hindia Timur atau "indonesia", Aceh masih satu negara merdeka yang berdaulat, yang mempunyai hubungan diplomatik dengan seluruh dunia. "Pada waktu itu" kata professor M. C. Ricklefs, "Aceh berdiri sebagai satu kekuasaan besar, paling berkuasa, kaya dan bertamaddun di kawasan Asia Tenggara." (M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, Bloomington, 1981, p. 335)

ANGGOTA DARI PADA KHILAFAH ISLAMIAH

Sebagai sebuah Negara Islam, Aceh tidak pernah berdiri sendirian di dunia, tetapi selamanya berhubungan dan bekerjasama dengan negara-negara Islam yang lain di dunia, terutama sekali dengan Khalifah Usmaniah di Turki (Turkiye) yang berbendera Bulan Bintang, yang sama dengan Aceh, dan menegakkan Hukum Syari'ah Islam yang sama pula dengan Aceh. Pada zaman itu Aceh selalu memihak Turki (Turkiye) dalam segala peperangan dengan negara-negara Barat. Mengenai kedudukan Aceh dalam Dunia Islam pada waktu itu, Professor Wilfred Cantwell Smith, menulis: "Pada abad ke-16, Dunia Islam sudah menjadi berkuasa kembali, kaya raya, mewah dan penuh kebesaran. Orang-orang Islam masa itu di Maroko, Istanbul, Isfahan, Agra, Aceh – adalah pembina-pembina sejarah yang besar dan sangat berhasil". (Wilfred C. Smith,

Islam in Modern History, Princeton, 1975, p. 38). Seorang ahli sejarah yang lain, Anthony Reid, telah menulis: "Dimasa sebelum Islam, dan dimasa Indonesia baru, Sumatera sebelah Utara khattulistiwa – Aceh – kelihatannya tidak penting. Tetapi dari kacamata sejarah Islam, Aceh adalah pusat Kepulauan Melayu selama lima abad lamanya." (Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Aceh, The Netherlands, and Britain*, London, 1969, p.1)

PERJANJIAN PERTAHANAN DENGAN KERAJAAN INGGERIS

Pada tahun 1819, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Inggeris menanda-tangani sebuah Perjanjian Pertahanan. Tujuan dari pada Kerajaan Aceh ialah supaya ada satu negara sahabat yang kuat. Tujuan dari Kerajaan Inggeris adalah untuk dapat menguasai Selat Melaka. Maksud dari pada Inggeris itu sudah diterangkan dengan jelas sekali oleh seorang anggota Parlemen Inggeris, Thomas Gibson Bowles, sebagai berikut: "Selat Melaka itu adalah pintu gerbang perniagaan antara Eropa dan Laut Cina. Hal ini dapat dipahami dengan selayang pandang pada peta dunia. Dan dimasa Kerajaan Inggeris masih mempunyai ahli-ahli negara, Selat Melaka itu dipandang dan diperlakukan sebagai tujuan yang penting sekali, satu pintu dunia yang tidak boleh ditutup orang terhadap perdagangan kita, dalam masa damai atau dalam masa perang. Tujuan ini telah kita jamin dengan menduduki Penang, Singapura, dan tempat-tempat penting (strategis) yang lain di sebelah utara-timur dari Selat Melaka, dan dengan membuat satu perjanjian Pertahanan dengan Raja Islam Aceh, yang memerintah pulau Sumatera. Dengan demikian satu pihak dari Selat Melaka ada dalam tangan kita sendiri, sedang pihak yang lain ada dalam tangan negara sahabat kita yang dapat dipercayai. Semua ini sudah kita capai dan kita buat menjadi satu kenyataan pada tahun 1819, dalam Perjanjian Pertahanan dengan Kerajaan Aceh itu. Perjanjian itu dianggap sebagai satu kemenangan diplomasi kita yang gilang-gemilang atas Belanda, dengan siapa kita sudah berlomba-lomba selama 200 tahun belakangan ini, untuk menentukan siapa yang berkuasa di perairan seberang lautan itu. Dengan adanya Perjanjian Pertahanan dengan Sultan Aceh itu, kita memperoleh Selat Melaka berada penuh dalam tangan kita." (Thomas Gibson Bowles, *FRAZER'S MAGAZINE*, London, Januari, 1874,

p.124). Yang mengusahakan Perjanjian Pertahanan Aceh-Inggeris ini adalah tidak lain dari Sir Stamford Raffles, pembangun Singapura yang kenamaan itu.

PEPERANGAN DENGAN BELANDA: KEMENANGAN ACHEH – KEKALAHAN BELANDA

Belanda, yang pada waktu itu sudah lebih 300 tahun menjajah pulau Jawa, selalu berusaha dengan tiada berhenti-hentinya untuk merebut wilayah Kerajaan Aceh disepanjang pantai selatan Pulau Sumatera untuk dimasukkan ke dalam daerah jajahannya. Pada tanggal 26 Maret, 1873, Belanda mengirim satu Ultimatum kepada Kerajaan Aceh yang masih tetap merdeka dan berdaulat itu, dan mempunyai Perjanjian Pertahanan dengan Kerajaan Inggeris, supaya menyerahkan Negeri Aceh dengan tidak melawan, dan supaya Negeri Aceh menjadi satu bagian dari Hindia Belanda alias "indonesia". Waktu Kerajaan Aceh menolak ultimatumnya itu, maka Belanda menyerang Aceh dengan mendaratkan 10,000 tentara Belanda, dibawah pimpinan Jenderal Köhler. Itu adalah pasukan Eropa yang terbesar pernah dikumpulkan di Asia Tenggara untuk melakukan serangan dalam sejarah.

Pada tanggal 23 April, 1873, dalam Medan Perang Bandar Aceh, Tentara Belanda dihancurkan-leburkan oleh Tentara Negara Aceh dan Panglima Besar Belanda, Jenderal Köhler, dihukum mati oleh Tentara Aceh sebagai penjahat perang di Kuta Raja. Ini adalah kakalahan penjajah Belanda atau Eropa yang paling besar di Asia Tenggara dalam sejarah penjajahan mereka. Surat kabar **LONDON TIMES**, pada tanggal **22 April, 1873**, memuat laporan lengkap dari Medan Perang Bandar Aceh, dimana antara lain ditulis: "Suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah penjajahan baru sudah terjadi di Kepulauan Melayu. Satu kekuatan Eropa yang besar sudah dikalahkan oleh tentara anak negeri, Tentara Negara Aceh. Bangsa Aceh sudah mencapai kemenangan yang mutlak. Musuh mereka bukan saja sudah kalah tetapi dipaksa lari". Dalam laporan lengkap itu, ditulis lagi oleh surat kabar London, bahwa Aceh bukanlah tanah jajahan Belanda dan Belanda sama sekali tidak mempunyai hak menyerang Aceh. Surat

kabar Amerika, **THE NEW YORK TIMES**, pada tanggal 6 Mei, 1873, menulis sebagai berikut: "Suatu pertempuran yang berlumur darah sudah terjadi di Aceh. Serangan Belanda sudah ditangkis dengan penyembelihan besar-besaran terhadap tentara Belanda. Panglima Belanda sudah dibunuh dan tentaranya lari lintang-pukang. Kekalahan Belanda itu dianggap hebat sekali dan ini terbukti dengan debat yang sudah terjadi dalam parlemen Belanda di Den Haag, dimana seorang anggota Parlemen sudah menyatakan bahwa kekalahan di Aceh ini adalah permulaan dari kejatuhan kekuasaan Belanda di Dunia Timur."

Pada tanggal 15 Mei, 1873, surat kabar **THE NEW YORK TIMES**, mengeluarkan sebuah tajuk rencana (editorial) dimana antara lain tertulis:

ACHEH

"Sekarang boleh dikatakan bahwa sudah dimulai pendidikan Aceh kepada keturunan Kristen yang baru.

Segera akan diketahui umum bahwa Bangsa Aceh itu bukanlah satu bangsa biadab yang tidak berurat-saraf (tidak pandai berpikir), tetapi mereka adalah bangsa Islam yang baik sekali dan bangsa pahlawan.

Segera akan nyata bahwa, sebagai musuh mereka, sekarang, juga mempunyai tanah jajahan mereka sendiri pada suatu masa, dan ada waktu-waktu ketika mereka begitu kuat hingga dapat mengepung armada Portugis di kota Melaka. Begitu juga akan menjadi pengetahuan umum bahwa pada suatu waktu, Sultan Aceh adalah sahabat karib dari Raja Inggris, James I, yang pernah memberikan dua buah meriam besar kepada saudara Aceh-nya. Meriam-meriam itu sekarang turut mempertahankan istana penggantinya di Sumatera".

Kekalahan Belanda ditangan Bangsa Aceh yang sangat memalukan menimbulkan komentar-komentar yang luar biasa dari para ahli-ahli sejarah di seluruh dunia. Misalnya, **Professor Ricklefs**, menulis: "Baru sekarang kaum kolonialis sudah berhadap-hadapan muka dengan lawan yang paling kaya, paling kuat, paling beraturan dan berdisiplin, paling lengkap bersenjata dan paling keras bersifat merdeka." (M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, p. 137)

KEDUDUKAN KEBESARAN ACEH DALAM DUNIA INTERNASIONAL

Adalah satu tanda dari pada kedudukan Kerajaan Aceh yang terkemuka dan menduduki tempat penting dalam dunia ketika Presiden Ulysses S. Grant dari Amerika Serikat segera mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa, yang dinamakan '**Pernyataan Berdiri-Sama-tengah Yang Tidak Memihak**' (*Proclamation of Impartial Neutrality*) dalam perang antara Belanda dengan Aceh. Dalam perjanjian ini dinyatakannya pula bahwa Amerika Serikat tidak mau membenarkan serangan Belanda atas Aceh. (**MESSAGES AND PAPERS OF THE PRESIDENTS**, Washington, D. C. , 1874).

Sesudah kemenangan di Bandar Aceh barulah pemerintah Kerajaan Aceh menuntut kepada pemerintah Inggris supaya menunaikan tugasnya membantu Kerajaan Aceh menurut Perjanjian antara kedua negara. Menurut perjanjian itu Inggris mempunyai kewajiban untuk membantu Aceh melawan serangan Belanda. Tetapi amat disesalkan bahwa pemerintah Inggris pada waktu itu mengkhianati perjanjian yang sudah ditanda-tangani oleh wakil-wakilnya yang berkuasa penuh itu. Kejadian ini akan tetap mendjadi bukti dan saksi sejarah bagaimana janji-janji Kerajaan Inggris itu tidak dapat dipercayai. Debat yang terjadi di parlemen Inggris perkara Perjanjian Pertahanan dengan Kerajaan Aceh ini kemudian membuktikan bahwa pemerintah Inggris sudah menerima suapan dari Belanda supaya tidak menepati dan menghormati janjinya dengan Kerajaan Aceh, dengan Belanda menyerahkan satu jajahannya di Afrika kepada Inggris: jajahan itu ialah Gold Coast, sekarang Ghana. **Lord Granville**, Menteri Luar Negeri Inggris pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Habib Abdul Rahman Zahir, Menteri Luar Negeri Aceh, pada 15 Juli, 1873, tidak pernah mengatakan bahwa Perjanjian Pertahanan Aceh-Inggris itu tidak sah, atau tidak berlaku lagi, atau sudah dibatalkan, tetapi ia hanya mengatakan bahwa Inggris tidak mau memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian itu. Oleh Menteri Luar Negeri Inggris itu tidak dibantahnya perkara ada dan sahnya Perjanjian itu. Ia hanya tidak mau melakukan kewajibannya menurut Perjanjian itu. Alasan yang diberikannya

untuk berkhianat itu ialah karena Inggeris "sudah menanda-tangani satu perjanjian lain dengan Belanda yang isinya berlawanan dengan Perjanjian dengan Aceh itu" dan juga dengan alasan bahwa Inggeris "telah tidak menjalankan dengan terus-menerus kewajibannya terhadap Aceh dalam Perjanjian itu."

Politik pemerintah Inggeris untuk tidak menghormati dan mengkhianati Perjanjian-nya dengan Kerajaan Aceh itu mendapat kecaman yang amat keras dalam surat-surat kabar Inggeris, dan dalam Parlemen Inggeris hingga hal itu menjadi perdebatan besar dalam pemilihan umum beberapa tahun lamanya. Hal ini juga menjadi satu bukti tentang kuatnya kedudukan Aceh dalam politik dunia internasional sebagai satu negara merdeka yang kedaulatannya diakui dunia dan tidak pernah menjadi persoalan atau perdebatan. **Thomas Gibson Bowles**, seorang pemimpin partai politik dan anggota Parlemen menulis sebuah artikel dalam majallah **FRAZER'S MAGAZINE**, yang terbit di London, dimana ia menamakan jawaban Lord Granville kepada Aceh sebagai "satu dokumen yang paling tidak mempunyai rasa malu, yang pernah ditulis manusia". Ia menamakan Perjanjian Inggeris-Belanda dimana Belanda menyerahkan satu daerah di Afrika kepada Inggeris untuk merugikan Aceh sebagai "satu tawar-menawar haram", dan jawaban Menteri Luar Negeri Inggeris kepada Aceh dinamakannya satu "satu pengakuan yang memalukan untuk meninggalkan kewajiban terhadap Aceh yang mencerminkan sikap orang-orang Kementrian Luar Negeri Inggeris yang selalu sedia mengkhianati Perjanjian antara-negara." Thomas Gibson Bowles membuat kesimpulan: "Surat dari Lord Enfield (Wakil dari Lord Granville) kepada Sultan Aceh bersifat sama sebagai di atas juga, sebab waktu oleh Sultan Aceh diminta bantuan Inggeris, menurut Perjanjian, supaya Inggeris membantu Aceh, oleh Enfeld dikatakan bahwa Inggeris tidak dapat memenuhi Perjanjian itu sebab Inggeris sudah lebih dahulu melanggarnya, dan ia menasehati Sultan Aceh supaya sebaik-baik dengan Belanda yang menyerangnya. Dalam kedua perkara ini, pihak yang bersalah yang berpura-pura berkhutbah kepada pihak yang menjadi korban, dan meletakkan atas pundak yang tidak bersalah, tanggung-jawab dari pihak yang bersalah. Kami mengatakan bahwa

yang bersalah adalah pemerintah Inggeris." (**FRAZER'S MAGAZINE**, London, Januari, 1874, p. 124-134).

Lord Stanley of Alderley, seorang bangsawan Inggeris, berdiri dalam Majlis Tinggi Parlemen Inggeris (House of Lords) membela Aceh dan mengecam Pemerintah Inggeris sebab telah melanggar Perjanjian Pertahanan dengan Aceh. Beliau menuntut supaya Pemerintah Inggeris menghormati dan memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Pertahanan tersebut, dan supaya Inggeris membantu Aceh melawan Belanda. Dalam sebuah pidato pada tanggal 28 Juli, 1873, beliau berkata:

"Belanda tidak mempunyai alasan dan tidak mempunyai sebab untuk menyerang Aceh yang tidak berbuat apa-apa kepada Belanda. Sekarang Belanda sudah menyerang Negara Aceh dan sudah dikalahkan dan digagalkan. Kejatuhan Aceh akan menyebabkan kehancuran kemuliaan kita diseluruh Asia Timur dan Asia tenggara; kekecewaan besar akan dirasa oleh warga Inggeris di Asia Tenggara dan oleh orang-orang Melayu di Malaya, yang kesan baik dari mereka adalah sangat penting bagi kita. Perjanjian baru antara Inggeris dengan Belanda ini bukan saja merusakkan kemuliaan Negara Inggeris tetapi juga merusakkan kepentingan ekonomi kita. System penjajahan Belanda di Jawa bukan saja berlawanan sekali dengan kebebasan perdagangan, tetapi hampir tidak berbeda dari perbudakan – Belanda menamakannya "kerja-tidak-bergaji" – sehingga tidak ada alasan sama sekali mengapa pemerintah Inggeris mau menolong meluaskan sistem ini sampai ke Sumatera Utara, atau sekurang-kurangnya mengapa tidak dibuat pengecualian untuk Aceh sebab Negara Aceh berhak mengharap kita tidak melupakan kemerdekaannya yang dari zaman purbakala, dan sejarahnya yang gilang-gemilang, sebab Aceh sudah menjadi satu negara Merdeka ketika Belanda masih satu provinsi Spanyol."

"Sejak waktu itu Aceh sudah mempunyai pengaruh yang besar sekali atas Selat Melaka, dan mengirimkan armada besar-besar, yang sering mengalahkan armada yang besar-besar, yang sering mengalahkan armada Portugis dalam setiap peperangan. Lebih 300 tahun yang lalu Aceh sudah meletakkan dirinya dibawah perlindungan Khalifah Usmaniah (Turki) dan meriam besar-besar yang dikirimkan oleh Sultan Salim sebagai hadiah kepada Raja-raja Aceh masih dapat dilihat sampai sekarang di Pidië dan Pasè. Perlu kita

tanya: mengapa Belanda telah menyerang satu negara Merdeka dan berdaulat yang tidak berbuat apa-apa terhadap negeri Belanda, dan ini dilakukan pada waktu dimana Belanda sendiri masih takut kemerdekaannya yang baru diperoleh itu mungkin dirampas oleh negara lain, lebih-lebih sesudah perang Perancis – sebab semua kita mengetahui bahwa di Jerman ada satu partai yang ingin mengambil negeri Belanda dan merampas tanah jajahannya sekali, dan sebagian besar orang Jerman sudah yakin bahwa golongan terbanyak dari bangsa Belanda memang ingin bersatu dengan Jerman. Dalam hal ini, Jerman mempunyai hak yang sama besar atau sama kecilnya seperti "hak" Belanda untuk menyerang dan menjajah Aceh. Jawa saja tidak menjadi soal, tetapi kalau Sumatera dimasukkan ke bawah Jawa maka mungkin baru inggris tidak akan mengakuinya. Dalam sesuatu keadaan, sikap pemerintah Inggris sudah dapat diterka, misalnya seperti waktu negeri Belanda jatuh dalam tangan Perancis pada awal abad ini (dimana Inggris menduduki Jawa supaya Jawa jangan diambil oleh Perancis). Inggris masih mungkin membiarkan Jawa jatuh ketangan Tuan-nya yang lain, tetapi mustahil Inggris dapat menerima Aceh jatuh kedalam tangan sesuatu kekuasaan militer yang kuat. Sebab sebagai sudah dikatakan oleh Admiral Sherard Osborn baru-baru ini, Aceh adalah satu tempat yang amat penting sekali dalam strategis perang lautan." (**HOUSE OF LORDS, Speech of Lord Stanley of Alderley, 28 juli, 1873. Hansard, Vol. 217, p. 1077-1081**)

Dalam perdebatan yang terus-menerus di Inggris perkara perjanjian Pertahanan dengan Aceh yang sudah dilanggar Inggris itu, ada juga yang memakai alasan bahwa Perjanjian Belanda-Inggris tahun 1871 sudah membatalkan Perjanjian Aceh-Inggris tahun 1819. Thomas Gibson Bowles menjawab soal ini dalam satu suratnya kepada surat kabar **LONDON TIMES, 3 Februari, 1874**, sebagai berikut: "Perjanjian Belanda-Inggris tahun 1871 sama sekali tidak dapat membebaskan Pemerintah Inggris dari kewajibannya menepati janji untuk mempertahankan Aceh menurut Perjanjian Pertahanan tahun 1819. Maka adalah satu pelanggaran keperjajaan umum yang luar biasa dan hina sekali untuk menolak menepati kewajiban yang timbul dari Perjanjian yang sudah ditanda-tangani itu." (**THE TIMES, London, 3 Februari, 1874, p. 10**).

Surat kabar London, **VANITY FAIR**, tanggal 12 September, 1874, mengeluarkan tajuk rencana (editorial) mengenai Perjanjian Pertahanan Aceh-Inggris yang sudah dikhianati itu:

"Perhatian sudah diminta berulang-ulang oleh banyak penulis-penulis kepada surat kabar ini mengenai pelanggaran yang besar sekali kepada Perjanjian Negara antara Inggris dengan Aceh dimana Inggris telah menolak kewajiban untuk membantu satu negara sahabat jaitu Kerajaan Aceh. Perbuatan ini telah dimulai oleh Pemerintah Gladstone dan diteruskan lagi oleh Pemerintah Disraeli sampai kini. Keduanya menolak memenuhi kontrak yang sudah ditanda-tangani atas nama Kerajaan Inggris pada tahun 1819, dengan Kerajaan Aceh, untuk membantu negara itu kalau diserang musuh. Perdana Menteri Disraeli, ketika ditanya dalam sidang Parlemen dalam perkara itu, tidak berani membantah tentang adanya Perjanjian itu – **sebab ia tidak bisa** – karena Perjanjian itu masih tetap legal dan mengikat, tetapi masih terus-menerus dilanggar. Perkara ini hendak didiamkan oleh orang-orang yang tertentu dalam Kabinet, tetapi menyebabkan malu dan amarah orang-orang yang mengetahui apa yang sudah terjadi dalam soal ini." Keterangan tambahan yang sangat berharga sudah datang lagi dari Singapura, dan telah dikeluarkan oleh surat kabar **MORNING POST**, hari Senin yang lalu - satu surat yang rupanya ditulis oleh seorang yang mengetahui segala apa yang terjadi disekitar soal itu. Dalam surat itu ditulis: "Dewasa ini semua kami yang ada disini sependapat perkara politik busuk - itulah istilah yang terbaik yang dapat kami pakai - yang di ikuti oleh pemerintah di London dalam perjuangan yang sedang berlaku antara Belanda dengan Bangsa Aceh. Inggris mestinya tidak berdiri menonton saja, dengan tidakberbuat apa-apa, melihat sahabat syarikat lama (Aceh bukan hanya syarikat lama tetapi masih syarikat baru sampai sekarang menurut hukum Perjanjian antara negara) ditaklukkan dengan tidak mengatakan apa-apa, apalagi berbuat sesuatu membantu mereka. Sikap Inggris ini sedang meruntuhkan nama, kemuliaan dan kepentingannya dibagian dunia ini.

"Dikatakan bahwa Inggris adalah neutral dalam perang ini, tetapi Belanda dibiarkan mempergunakan wilayah jajahan kita disini sebagai basis operasi menyerang Aceh. Jadi Inggris bukan saja tidak membantu Aceh, sebagai kewajibannya menurut Perjanjian, tetapi ia memberikan kepada Belanda segala bantuan untuk

menaklukkan Aceh. Sudah pasti ini adalah puncak dari pengkhianatan. Dan Perdana Menteri baru, Tuan Disraeli, sesudah menyela Perdana Menteri lama, Tuan Gladstone, dalam perkara ini, sekarang dia sendiri juga berbuat demikian: membantu Belanda mendudukkan Aceh. Walaupun demikian masih banyak orang yang menyangka bahwa dalam demokrasi semua dapat diperbaiki dan diubah dengan menggantikan satu kabinet dengan kabinet yang baru, partai pemerintah dengan oposisi. Satu bangsa sudah menjadi rendah sekali apabila ia tidak peduli lagi kepada kehormatannya dan kepada perkara-perkara seperti ini.

"Perkara kenyataan dalam soal ini tidak mungkin ada perdebatan: sebab semuanya adalah terang-benderang. Inggris terikat dengan Perjanjian Pertahanan untuk mempertahankan Aceh. Mula-mula Lord Granville berusaha menolak perjanjian itu. Lord Derby, yang seharusnya memperbaiki nama baik negerinya dan bangsanya tetap berbuat sebagai orang-orang yang digantinya. Mereka adalah pantas menjadi Menteri-menteri dari pada satu bangsa yang sudah hilang perasaan kehormatannya."

Surat kabar London, **PALL MALL GAZETTE**, pada 30 Januari, 1874, menulis sebagai berikut:

"Pada tahun 1819, pemerintah kita dapat menguasai Selat Melaka. Segala perdagangan dengan China dan Jepang harus melalui selat yang penting ini. Kita memperoleh kontrol yang penuh atas Selat Melaka dengan adanya Perjanjian Pertahanan 1819 dengan Kerajaan Aceh. Bagian tepi pantai Melaka kita kuasai sendiri langsung. Tepi pantai sebelah Sumatera kita amankan dengan Perjanjian Pertahanan dengan Sultan Aceh yang menguasai seluruh pantai Sumatera. Tiga tahun yang lalu Belanda datang kepada kita. Mereka mengatakan jika kita biarkan mereka menyerang Sultan Aceh dan merebut Negeri Aceh, mereka akan memberikan kepada kita satu daerah jajahannya di Afrika, di Gold Coast. Jika kita serahkan Selat Melaka kepada mereka, mereka akan memberikan kepada kita sekeping tanah Gold Coast yang tidak berharga apa-apa kepada mereka, dan lebih dan lebih tidak berharga lagi kepada kita. Dan jika kita terima hadiah mereka, kita akan terlibat dalam peperangan dengan Raja Kofi. Ini adalah usul gila, tetapi kementerian kita menerimanya, dan mengorbankan Sultan Aceh kepada serangan Belanda, walaupun kita sudah menada-tangani perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh. Tidak pernah ada satu

"tawar-menawar" semacam ini dalam sejarah negeri Inggris. Tetapi sudah diterima oleh Menteri-menteri kita. Perdana Menteri Gladstone membuatnya seakan-akan satu rahasia besar yang katanya mengingatkannya kepada surat-menyurat diplomatik. Jika sebagai kata Tuan Gladstone: adalah satu kesalahan pemerintah Konservatif yang telah memberikan Siak kepada Belanda, dan itu adalah salah; tetapi itu tidak membuat politiknya terhadap Aceh benar. Kita tidak bersumpah membela siak, tetapi kita telah bersumpah membela Aceh. Sebab itu Inggrislah yang bertanggung-jawab atas darah yang berjujukan di Aceh."

Patut kita singgung disini juga satu kenyataan lain, yaitu bahwa Belanda harus menghadapi kesukaran-kesukaran diplomatik yang bukan kecil di Dunia Islam dalam menghadapi Aceh, lebih-lebih Turki (Turkiye), oleh karena kedudukan Aceh yang kuat sebagai bagian dari pada Khalifah Islamiah. Di Turki (Turkiye) pada waktu itu besar gerakan untuk campur tangan langsung membantu Aceh. Surat-surat kabar Turki (Turkiye) pada masa itu seperti **BASIRAT**, **JEVAIB**, **LA TURQUI**, semuanya terbit di Istanbul, penuh dengan artikel-artikel dan editorial yang membantu Aceh. Semua ini menunjukkan kekuatan diplomasi Aceh di dunia.

SERANGAN BELANDA YANG KEDUA DAN KEKALAHAN YANG TERAKHIR

Sebagaimana yang terjadi, sesudah kekalahannya dalam serangan pertama itu, Belanda melakukan serangannya yang kedua, ketiga, ke-empat, ke-lima dan keenam, dengan tidak pernah mencapai kemenangan yang sesungguhnya terhadap bangsa Aceh yang mempertahankan dirinya itu. Perang Belanda (sebagai bangsa Aceh melihatnya) berjalan hampir satu abad, sehingga oleh majalah Amerika, **HARPER'S MAGAZINE**, sudah dinamakannya sebagai '**PERANG SERATUS TAHUN MASA INI**' (**HARPER'S MAGAZINE**, New York, Agustus, 1905: '**THE ONE HUNDRED YEARS WAR OF TODAY**'). Akhirnya bangsa Belanda sudah dikalahkan oleh Bangsa Aceh dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi diseluruh Aceh pada bulan Mart, 1942, sebelum Jepang masuk ke Aceh dalam Perang Dunia ke-II. Demikianlah, Belanda tidak pernah

menanda-tangani surat menyerah kepada Belanda, atau surat berdamai dengan Belanda, dan perlawanan tidak pernah dihentikan sampai akhirnya Belanda diusir dari bumi Aceh dengan segala kehinaan.

Tetapi diantara dua tanggal itu, nyakni antara tanggal 26 Mart, 1873 (ketika Belanda menyatakan perang kepada Kerajaan Aceh yang merdeka dan berdaulat) dan bulan Mart 1942 (ketika semua Belanda dan kaki-tangan-nya diusir dari Aceh) Belanda pernah membuat propaganda bohong yang mengatakan bahwa mereka sudah dapat 'menaklukkan Aceh' Negara Aceh, dan bahwa mereka sudah 'sah' menduduki Aceh, jaitu 'legal'. Propaganda Belanda ini adalah palsu dan bohong sama sekali. Belanda tidak pernah dapat berbuat sebagai apa yang dipropagandakannya itu. Sebagaimana sudah diketahui, serangan Belanda yang pertama, dibawah pimpinan Jendral Köhler, sudah dihancur-leburkan oleh Tentara Aceh dan Köhler sendiri dihukum mati di Bandar Aceh. Serangan Belanda yang kedua dibawah pimpinan Jendral Van Swieten, yang dimulai pada tanggal 25 Desember, 1873, dengan kekuatan yang jauh lebih besar lagi dari serangan yang pertama, juga tidak mendapat kemenangan, sebagaimana sudah diakui sendiri oleh Van Swieten dalam buku-nya **DE WAARHEID OVER ONZE VESTIGING IN ACHEH** (*Keadaan sebenarnya tentang pendudukan kita di Aceh*), 1879. Dalam bulan Januari, 1874, segera sesudah ia mendarat dipantai Aceh, van Swieten menyatakan kepada dunia bahwa ia sudah 'mengambil' (annexed) Kerajaan Aceh dan memasukkannya ke dalam Hindia Belanda (alias "indonesia"). Ini telah dilakukannya untuk menyenangkan hati bangsa Belanda yang telah begitu malu dimata dunia atas kekalahan-kekalahan yang mereka terima dari tangan bangsa Aceh. Tetapi karena Negara Aceh dan Tentara Aceh yang sangat kuat itu masih berdiri dan mengalahkan tentara Belanda dalam setiap medan perang yang terjadi sesudahnya, maka propaganda bohong dari Van Swieten itu tidak dapat disembunyikan kebohongannya dari mata dunia, sehingga pernyataan Van Swieten itu menjadi masyhur dengan nama "*Van Swieten's illegal Annexation of Aceh*" (Anthony Reid, 'VAN SWIETEN'S

ILLEGAL ANNEXATION OF ACHEH', The Contest for North Sumatra). Kemudian dari pada itu, pada tahun 1879, Van Swieten sendiri mengaku bahwa ia sebenarnya tidak pernah dapat menaklukkan Aceh, dan ia meminta kepada bangsanya supaya ia jangan lagi dipanggil dengan nama julukan "Penakluk Aceh" sebab katanya ia malu – karena ia tidak pernah dapat menaklukkan bangsa Aceh. Berdasarkan atas pengalamannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Aceh, Van Swieten mengatakan bahawa ia sudah yakin bangsa Aceh itu tidak mungkin dapat dikalahkan dalam medan perang. Sekarang ia mengatakan bahwa Perang Aceh itu satu kesalahan dari pemerintah Belanda. Belanda wajib menarik diri dari Aceh dan mengakui Aceh sebagai Negara Merdeka kembali. Perang Aceh bukan saja menghancurkan tentra Belanda di Aceh, tetapi akan menghancurkan kekuasaan Belanda di "indonesia" . Van Swieten begitu yakin pada pendiriannya itu hingga ia menyusun satu gerakan politik di negeri Belanda untuk mempengaruhi pemerintah Belanda supaya mengikuti kebijaksanaan politik yang dianjurkannya. Kata van Swieten : "*Une nation ne meurt pas de reconnaitre une faute, mais d'y persister*" – satu bangsa tidak akan mati karena menginsafi satu kesalahan yang sudah dibuatnya, tetapi akan mati karena jika bangsa itu terus-menerus melakukan kesalahan itu! Seorang jendral Belanda yang sudah menyatakan bahwa sudah 'mengambil' dan sudah 'menaklukkan' dan sudah 'memasukkan' Negara Aceh Merdeka kedalam "indonesia"-nya, kini menuntut supaya Aceh di akui sebagai Negara Merdeka kembali. (**J.VAN SWIETEN, DE WAARHEID OVER ONZE VESTIGING IN ACHEH**)

Tetapi lagi-lagi, pada tahun 1881, pemerintah Belanda menyatakan bahwa Aceh sudah dapat ditaklukkan dan bahwa Perang Aceh sudah selesai dengan kemenangan bagi pihak Belanda. "*Ini adalah angan-angan yang bukan-bukan, yang tidak berdasar kenyataan, yang dibikin-bikin oleh kaum penjajah,*" tulis peoffessor **M.C.Ricklefs**, dalam bukunya **A HISTORY OF MODERN INDONESIA, Bloomington, Indiana University Press, 1981, p.137**. Seterusnya ia memberi komentar sebagai berikut: "Perang Aceh

adalah satu peperangan yang lama dan pahit sekali. Ketika tentara Belanda maju sambil menjatuhkan bom dan membakar kampung-kampung, penduduk lari ke gunung-gunung tetapi tetap meneruskan perlawanan mereka.... Perlawanan dipimpin oleh ulama-ulama dan yang paling masyhur adalah Tengku Tjihik di Tiro (1836-91), dan perlawanan menjadi perang suci antara Ummat Islam dan kafir. Akhirnya Belanda menjadi sadar bahwa mereka tidak menang apa-apa, dan tidak menguasai sejangkal tanah diluar tangsi-tangsi mereka. Biaya peperangan ini begitu besar sehingga pada tahun 1884-5 Belanda terpaksa menarik mundur tentaranya ke benteng-benteng, dan dengan demikian maka negeri Aceh kembali dalam tangan bangsa Aceh sendiri."

Surat kabar London **MORNING POST**, menulis dalam editorial-nya pada hari 2 Juli, 1874, sebagai berikut:

"Sudahlah menjadi satu kenyataan bahwa bangsa Aceh itu bukanlah satu bangsa yang mudah dikalahkan orang. Mereka sudah memperlihatkan kekuatan dan kesanggupan yang hampir-hampir tidak ada contohnya dalam melawan dan menentang sipenjajah negeri mereka. Laporan yang terakhir, yang kami terima dari sumber-sumber yang dipercayai, memperlihatkan betapa besar kekuatan dan bagaimana keras tekad mereka untuk meneruskan peperangan: mereka munjul kembali ditempat-tempat dimana tadinya mereka sudah dikalahkan dan ditempat-tempat yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Belanda.... Kabarnya kenyataan-kenyataan ini sudah begitu besar mempengaruhi dan mengubah pendapat Jenderal Van Swieten mengenai semangat perang bangsa Aceh. Satu bangsa yang sanggup berperang dengan semangat yang semacam ini tidak akan segera menyerah, dan kini sudah terang bahwa Belanda sudah salah terka dengan pernyataan-pernyataannya yang mengatakan peperangan akan segera berakhir.... Keberanian bangsa Aceh memaksa kita mengangkat tangan; memberi hormat; dan ada sesuatu dalam semangat bangsa yang baik ini yang menyebabkan mereka tidak mau merendahkan diri kepada sipenjajah dan musuh-musuh mereka yang sudah rusak, atau mendirikan yang baru ditempat benteng lama yang sudah roboh, dan dari sana membalas tembakan Belanda walaupun tidak kena, tetapi mesti ada balasan! Oleh karena itu apakah perlu diherankan bahwa 'kemenangan' Belanda itu

begitu tidak meyakinkan? Ketika sejarah perang antara Belanda dengan Aceh ini ditulis dan dibukukan, kita pikir, hal itu tidak akan menambah kebesaran bangsa Belanda."

Hal ini sebenarnya sudah kejadian. Sampai sekarang sudah lebih 500 buku sejarah ditulis dalam bahasa Belanda mengenai Perang Belanda dengan Aceh itu dan sungguhlah bangsa Belanda tidak keluar dari halaman-halaman sejarah itu lebih baik dari sudut moral dan militer. Sebaliknya bangsa Aceh-lah yang ternyata lebih besar dan lebih baik dari sudut moral dan militer, dalam tekadnya untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Dalam satu diantara buku-buku sejarah Perang Aceh (Perang Belanda) yang terakhir, pengarangnya, **Paul Van't Veer**, membuat kesimpulan sebagai berikut:

"Bangsa Belanda dan negeri Belanda tidak pernah menghadapi satu peperangan yang lebih besar dari pada peperangan dengan Aceh. Menurut pandang waktunya, perang ini dapat dinamakan perang delapan-puluh-tahun. Menurut jumlah korbannya – lebih seratus ribu orang yang mati – perang ini ada satu kejadian militer yang tidak ada bandingnya dalam sejarah bangsa Belanda. Untuk negeri dan bangsa Belanda, Perang Aceh itu lebih dari pada hanya pertikaian militer: selama satu abad inilah persoalan pokok politik internasional, politik nasional, dan politik kolonial Belanda." (**Paul Van't Veer, DE ATJEH-OORLOG, Amsterdam, 1969, p. 10**).

"Aceh bukanlah Jawa. Sebenarnya sudahlah terang-benderang bahwa dalam bagian dunia yang secara umum dan tidak berketentuan disebut Hindia Belanda ("indonesia") tidak ada satu kerajaan yang dapat dibandingkan dengan Aceh. Ini kita tahu sekarang ini. Satu peperangan yang lamanya lebih setengah-abad, seratus-ribu orang mati, dan setengah milyar Rupiah Belanda abad ke-19 yang mahal itu, sudah menjadi bukti dari hal ini. Kita sudah tahu ini sekarang, tapi kita tidak tahu itu ditahun 1873. Biarlah kenyataan-kenyataan ini tegak berdiri – jangan sembunyikan – supaya orang-orang di negeri Belanda, atau lebih lagi di pulau Jawa, dapat mengetahui manusia yang bagaimana bangsa Aceh itu." (**Paul Van't Veer, DE ATJEH OORLOG, p. 76**)

Paul Van't Veer menulis dalam bukunya itu semua kejadian-kejadian di Aceh antara tahun 1942 ketika bangsa Belanda diusir dari Aceh untuk kali yang terakhir. Ia membuat kesimpulan: "Aceh adalah yang paling akhir ditaklukkan tetapi

yang pertama sekali merdeka kembali!" – sebab sehabis Perang Dunia ke-II, ketika Belanda kembali menduduki tanah jajahan mereka yang kini sudah diberi nama baru sebagai "indonesia", mereka tidak berani kembali ke Aceh. Sebab itu adalah menjadi hak bangsa Aceh untuk merdeka dan berdaulat kembali – seperti dimasa sebelum Belanda datang menyerangnya. Tetapi hal yang adil dan lumrah ini tidak terjadi karena kedustaan dan tipuan bangsa Belanda dan Jawa atas bangsa Aceh.

PENJAJAHAN BELANDA DIGANTIKAN DENGAN PENJAJAHAN JAWA

Pada tanggal 27 Desember, 1949, Belanda menanda-tangani satu perjanjian dengan regime Jawa di Jakarta yang menamakan dirinya "republik indonesia" supaya dapat mendakwakan wilayah-wilayah diluar Jawa sebagai 'milik'nya, padahal mereka adalah orang-orang Jawa belaka yang tidak pernah dipilih atau diberi kuasa oleh bangsa-bangsa yang bukan Jawa, apalagi oleh bangsa Aceh. Nama "indonesia" yang mereka pakai itu adalah nama pura-pura, dalam bahasa Grik (Yunani) yang bermakna "kepulauan keling", yang tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan bahasa, sejarah, budaya kita penduduk Dunia Melayu yang amat luas ini. Perjanjian antara Belanda dengan Jawa inilah yang menjadi 'alat' pemindahan kekuasaan Belanda kepada Jawa, dan yang menjadi 'sumber' kekuasaan Jawa atas Dunia Melayu. Karena Belanda sebagai penjajah tidaklah mempunyai hak legal atas Tanah-tanah orang yang dirampasnya, maka "republik indonesia-jawa" inipun tidaklah mempunyai hak legal apa-apa atas wilayah Kepulauan Melayu yang masing-masing pulau itu adalah milik rakyatnya masing-masing. Belanda telah membuat Perjanjian illegal itu dengan Jawa sebab regime Batavia (Jakarta) bersedia menjamin kepentingan ekonomi Belanda sampai Hari Kiamat disini: *membayar hutang negeri Belanda, memberi gaji pegawai-pegawai negeri Belanda, membayar pensiunan mereka, dan lain seterusnya*. Itulah Perjanjian yang membuat dan mensahkan "indonesia-jawa" sebagai neo-colony bagi Belanda, dan merampas hak menentukan nasib diri-sendiri dari pada penduduk Kepulauan Melayu seluruhnya, termasuk

dari pada bangsa Aceh sendiri yang sudah merdeka sejak ribuan tahun – sebelum Belanda sendiri mendapat kemerdekaannya.

Dalam Perjanjian Belanda-Jawa ini, Belanda berpura-pura 'menyerahkan' kedaulatannya atas Aceh yang tidak pernah ada itu, kepada regime "republik indonesia", se-akan-akan Aceh adalah satu bagian dari Hindia Belanda, dan se-akan-akan Aceh pernah ditaklukkan dan dikuasai oleh Belanda, se-akan-akan Perang Aceh/Belanda yang hampir seratus tahun itu tidak pernah terjadi. Dan semua ini dilakukan dengan tidak ada pemilihan, permusyawaratan atau muwafakat dengan bangsa Aceh. Hal ini telah dilakukan walaupun diketahui Belanda tidak pernah mempunyai kekuasaan *de jure* atau *de facto* atas Aceh. Apalagi ketika Belanda menanda-tangani Perjanjian itu dengan Jawa, Belanda sudah tujuh tahun – dari tahun 1942 sampai tahun 1949 – tidak menginjakkan kaki kotornya diatas bumi Aceh. Sungguhpun demikian Perjanjian illegal antara Belanda dengan Jawa ini disahkan oleh negara-negara imperialis Barat, sehingga dengan itu negeri Aceh sudah diletakkan dibawah penjajahan Indonesia/Jawa sejarah illegal.

Semua ini adalah berlawanan 100% dan bertentangan langsung dengan Hukum Dekolonisasi dari PBB dan Hukum Internasional. Perbuatan Belanda – Jawa ini melanggar semua keputusan (Resolusi) Sidang Umum PBB mengenai penjajahan. Kerjasama antara penjajah Belanda yang dengan penjajah Jawa yang baru untuk menghilangkan hak bangsa Aceh untuk merdeka kembali tidak jontohnya dalam sejarah, apalagi karena ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Decolonisasi PBB dalam soal ini adalah tegas sekali : (a) **Kedaulatan atas wilayah-wilayah jajahan ada dalam tangan bangsa-bangsa penduduk wilayah itu sendiri – bukan dalam tangan sipenjajah atau pemerintah asing - Keputusan Sidang Umum PBB 1514-XV;** (b) **Kedaulatan atas setiap tanah jajahan tidak boleh diserahkan oleh satu penjajah kepada penjajah atau penguasa yang lain - Keputusan PBB 1514-XV;** dalam hubungan ini, Belanda sama sekali tidak berhak menyerahkan kedaulatan atas Aceh kepada regime Indonesia/Jawa.

Demikian juga atas pulau luar Jawa yang lain; (c) Semua kekuasaan wajib dikembalikan oleh sipenjajah kepada bangsa asli dari tiap tanah jajahan: dalam hal ini kekuasaan atas Aceh wajib dikembalikan kepada bangsa Aceh, dan demikian juga di negeri-negeri lain, dan bukan sekali-kali kepada bangsa Jawa – Keputusan PBB 1514 –XV; (d) Semua negara anggota PBB berkewajiban menghabiskan penjajahan dan wajib melarang siapapun menggunakan kekerasan terhadap bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaan mereka: dalam hal ini apa yang dilakukan oleh sipenjajah Jawa di Aceh, Papua, Maluku Selatan dan Timor adalah sebaliknya – Keputusan PBB 2625-XXV; (e) Kepada bangsa-bangsa terjajah diberi hak melawan sipenjajah mereka, dan penjajahan dipandang sebagai kejahatan internasional – Keputusan PBB 2621 –XXV; (f) Dilarang menggunakan kekerasan senjata atas mereka yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya – Keputusan PBB 3314 – XXIX; bandingkan ini dengan apa yang sedang dilakukan oleh sipenjajah Indonesia/Jawa sekarang ini dimana-mana di kepulauan Melayu. (g) Setiap wilayah jajahan mempunyai hak hukum (legal status) yang terpisah dari wilayah jajahan yang lain dan hak ini tidak boleh ditiadakan oleh sipenjajah dengan alasan mempersatukan administrasi dls sebagai yang dilakukan Belanda di "indonesia" – Keputusan PBB 2625 – XXV; (h) Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib diri-sendiri dan hak kemerdekaan, menurut piagam PBB, artikel I, bagian 2 dan 55; menurut Piagam Hak Bangsa-bangsa (Universal Declaration of the Rights of the Peoples) artikel 5, 6, dan 11; menurut Piagam Hak Manusia (Universal Declaration of Human Rights); menurut Piagam Hak Ekonomi, Kemasjarakatan dan Kebudayaan (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights); dan menurut Piagam Hak Umum dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (*Dr. Tengku Hasan di Tiro, The Legal Status of Aceh Sumatra under International Law, New York, 1980*).

Menurut semua aturan dan hukum ini yang sudah dijalankan diseluruh dunia – kecuali di Hindia Belanda atau "indonesia" – maka Aceh sudah lama berhak merdeka kembali.

PERJUANGAN ACHEH MERDEKA ADALAH LEGAL DAN MENURUT HUKUM

Keputusan Sidang Umum PBB No.2621-XXV, yang diambil pada 12 Oktober, 1970, yang berisi program lengkap untuk bertindak guna melaksanakan Pernyataan tentang Kemerdekaan – Declaration on Independence - dengan tegas menamakan segala usaha untuk membenarkan penjajahan/penguasaan oleh satu bangsa atas bangsa yang lain sebagai "kejahatan". Inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh sipenjajah Indonesia/Jawa atas bangsa Aceh, dan atas bangsa-bangsa lain di Dunia Melayu. Keputusan PBB itu mengakui adanya "*Hak Mutlak dari pada bangsa-bangsa yang sudah dijajah itu untuk berjuang dengan segala jalan/alat yang diperlukan*" dalam melawan sipenjajah mereka.

Keputusan Sidang Umum PBB No. 2711-XXV, yang diambil pada 14 Oktober, 1970, mengakui kelegalan semua perjuangan kemerdekaan, termasuk perjuangan bersenjata, yang dilancarkan oleh bangsa-bangsa yang masih terjajah, untuk mencapai kemerdekaan mereka dan menghanjurkan regime penjajahan dan regime-regime asing yang datang dari seberang lautan menjajah mereka. Semua anggota PBB diminta supaya memberi bantuan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan ini.

Ini adalah dasar-dasar hukum dalam Hukum Internasional dari Angkatan Aceh Sumatera Merdeka (NATIONAL LIBERATION FRONT OF ACHEH SUMATERA) dalam perjuangan membebaskan diri dari penjajahan Indonesia/jawa. Angkatan Aceh Merdeka sudah menegaskan sifatnya yang internasionalis dengan menyatakan solidaritet dengan segala gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah dan tertindas di dunia.

Dan di atas semua ini Angkatan Aceh Sumatera Merdeka adalah satu organisasi Islam yang berdiri atas dasar Islam dan membenarkan dirinya atas kewajiban Muslim untuk menegakkan

ke'adilan, melindungi yang tertindas, membenarkan yang benar dan melarang yang salah.

TUJUAN ANGKATAN ACHEH SUMATERA MERDEKA

Tujuan yang tertinggi dari Angkatan Aceh Sumatera Merdeka ialah keselamatan bangsa Aceh dan Sumatera, dunia dan akhirat, sebagai satu bangsa merdeka dan berdaulat dibawah Daulat Allah dan sebagai satu jama'ah dari pada satu Ummah: ini bermakna jaminan keselamatan nilai-nilai agama, politik, masyarakat, budaya dan ekonomi mereka, yang kesemuanya kini sedang dihancurkan oleh penjajahan Indonesia/jawa; keselamatan tanah pusaka mereka yang kini sedang dirampas dan dibagi-bagikan kepada bangsa penjajah Jawa yang didatangkan beramai-ramai dengan memakai topeng sebagai "transmigrants"; keselamatan ekonomi dan kekayaan alam mereka yang kini sedang dirampok oleh penjajah Jawa dengan dalang-dalang mereka kaum imperialis Barat atas nama "pembangunan". (Dr. Tengku Hasan di Tiro, *Indonesia as a Model Neo-Colony*, London, 1984).

Yang kedua untuk menarik perhatian dunia kepada kenyataan bahwa perkara Aceh Sumatera Merdeka bukanlah perkara "separatisme" - hanya untuk memisahkan diri - sebagai yang dipropagandakan oleh sipenjajah Jawa, tetapi adalah perkara Hak menentukan Nasib-diri-sendiri dari bangsa Aceh dan Sumatera, dan perkara Dekolonisasi atau Pembubaran dari Hindia Belanda, alias "indonesia", yang sampai sekarang belum dilakukan menurut ketentuan yang diwajibkan oleh PBB dan Hukum Internasional, dan menurut keputusan PBB mengenai kewajiban memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang terjajah. Oleh karena itu perkara pembubaran Hindia Belanda alias

"indonesia" mesti dibuka kembali sekarang juga.

KESIMPULAN

zzDari apa yang sudah kita kemukakan diatas sudah cukup nyata bahwa jika hak menentukan nasib diri-sendiri dan hak kemerdekaan bisa ditolak untuk bangsa Aceh, maka tidak ada satu bangsapun di dunia yang mempunyai hak untuk merdeka, dan Piagam PBB, Keputusan Sidang Umum, Program Dekolonisasi, dan Hukum Internasional, kesemuanya itu tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Apa yang dinamakan oleh sipenjajah Jawa sebagai "republik indonesia" mereka, adalah tetap sebagai satu gerombolan perampok dan pejah, penguasa yang tidak sah dan illegal atas Tanah Aceh dan Sumatera selama Hukum Internasional masih menentukan sah atau tidaknya kekuasaan sesuatu negara atas sesuatu wilayah adalah berdasarkan pada: bagaimana wilayah itu telah jatuh ke tangan negara itu! Sudahlah jelas bahwa apa yang disebut-sebut sebagai "republik indonesia" dari sipenjajah Jawa itu telah mengambil Aceh dan Sumatera sebagai hadiah yang tidak sah dari sipenjajah Belanda, yang tidak mempunyai hak de facto, tidak mempunyai hak de jure, dan tidak mempunyai hak untuk "menyerah kedaulatan" atas Aceh Sumatera kepada siapapun juga - apalagi kepada sipenjajah Jawa. Sebagai kata orang, nemo dat quod non habet - "orang tidak dapat memberikan apa yang tidak dipunyainya".